

Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah

Anyualatha Haridison¹, Dian Iskandar², Ummu Habibah Gaffar³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Dikirimkan: 12 Mei 2022

Direvisi: 29 September 2022

Diterbitkan: 30 September 2022

INTISARI

Kemampuan pengembangan ekonomi desa merupakan salah satu cara untuk melihat kemandirian desa, namun tidak banyak desa yang mampu melakukannya untuk mencapai level kemandirian desa, salah satunya adalah Desa Sampirang I (Satu) yang mendapatkan label sebagai desa sangat tertinggal. Setiap desa memiliki potensi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi, tanpa terkecuali Desa Sampirang I (Satu) yang berada di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di desa, dan menemukan model pengembangan ekonomi yang tepat agar dapat menjadi rekomendasi bagi desa-desa dengan kondisi yang sama. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, *indepth interview* dan observasi non partisipan. Sementara itu analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sampirang I (Satu) Memiliki berbagai potensi baik sumber daya alam terbaru, sumber daya manusia dan BUM Desa sebagai potensi kelembagaan yang merupakan modal awal dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun hal tersebut belum dikonversi dan diaktualisasikan karena adanya disparitas pembangunan yang membuat *high cost economic* dan tidak adanya intrusi multi-sektor yang menyentuh desa. Oleh sebab itu, dalam model pengembangan ekonomi lokal harus dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap inisiasi dan tahap aksi, pemerintah desa dan BUM Desa menjadi *main actor* dengan peran dominan pada masing-masing tahapan. Tahapan inisiasi didominasi oleh kekuasaan dan kewenangan pemerintah desa untuk melakukan pembuatan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan perekonomian desa yang berkelanjutan, membuka kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan percepatan pembangunan melalui lobby dan negosiasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi, serta melakukan penguatan kelembagaan BUM Desa. Sementara itu tahap aksi, BUM Desa sebagai motor penggerak dengan mengktualisasikan dan melakukan value upgrading dari produk hasil sumberdaya alam yang terbaru, serta marketing produk yang dihasilkan. Model pengembangan ekonomi lokal dapat dicapai jika adanya upaya optimal dari Pemerintah Desa dan BUM Desa bersama-sama dengan aktor lain baik public sektor, privat sektor, dan akademisi dalam jalinan kerjasama dan kemitraan serta kolaborasi untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.

KATA KUNCI:

Potensi Desa, Model Pengembangan Ekonomi Lokal, Desa Sampirang I (Satu)

Korespodensi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya. Jl. Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, Kec. Jekan Raya, Kalimantan Tengah 73111.

Email: dianiskandar@fisip.upr.ac.id

Pendahuluan

Desa mendapatkan perhatian khusus dari negara terutama dalam pembangunan desa semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menyiratkan bahwa dua hal menjadi kunci utama pembangunan desa yaitu membangun desa dan desa membangun. Terlepas dari itu semua, pemerataan kesejahteraan masyarakat desa menjadi tujuan utama dari dilahirkannya undang undang tersebut dan merupakan manifestasi kemandirian desa. Kemandirian desa dapat dilihat melalui kemampuan desa dalam pengembangan kapasitas ekonomi lokal dalam hal ini adalah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat desa. Sayangnya gelontoran dana desa tidak mampu mendikarikan desa, tanpa terkecuali desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah. Covid-19 turut andil menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin. Presetanse penduduk miskin di perdesaan di Kalimantan Tengah mengalami kelonjakan yang semula pada Maret 2020 4,96 % atau setara dengan 81.66 ribu jiwa naik ke 5,38 %, setara dengan 85.46 juta jiwa pada Maret 2021.

Pelonjakan kemiskinan juga menyentuh Desa Sampirang I (satu) Kabupaten Barito Utara, bahkan berdasarkan data IDM 2020 desa ini dicap sebagai desa sangat tertinggal. Desa ini sangat memprihatinkan, minim aksestabilitas komunikasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Setiap desa memiliki potensi untuk lepas dari jerat kemiskinan (H 2019). Sayangnya, upaya itu-lah yang belum maksimal, kegiatan ekonomi masih tertuju pada sektor pertambangan, akibatnya, sektor riil yang ada di desa kerap gagal dimanfaatkan (Ahmad Soleh 2017) (Nafsi 2020), padahal Desa Sampirang I (satu) memiliki potensi pertanian seperti jagung, tiap tahunnya desa ini mampu memproduksi sekitar 13.000 Ton Jagung(Raya 2019), artinya Desa Sampirang I (Satu) memiliki potensi yang siap diaktualisasikan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan memetakan potensi lokal yang ada dan kemudian mendesign model pengembangan ekonomi lokal desa yang tepat untuk melepaskan jerat kemiskin dan ketertinggalan di Desa Sampirang I (Satu) Kabupaten Barito Utara dan nantinya dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan ekonomi lokal bagi desa lainnya dengan kondisi yang sama.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengembangan ekonomi lokal selama ini hanya berfokus pada strategi pengembangan ekonomi lokal tanpa melihat kondisi wilayah tersebut. Kekosongan itulah yang diisi oleh penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kewilayahan, memerhatikan factor yang menyebabkan terkredilnya perekonomian lokal di desa, memetakan potensi desa serta memusatkan perhatian pada kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki oleh *main actor* (pemerintah desa dan BUM Desa) untuk berkolaborasi dengan aktor lain dan berinovasi dalam pengembangan ekonomi lokal desa. Sehingga dapat menciptakan model pengembangan ekonomi lokal yang relevan dengan kondisi desa sangat tertinggal terutama Desa Sampirang I agar terlepas dari kemiskinan dan ketertinggalan.

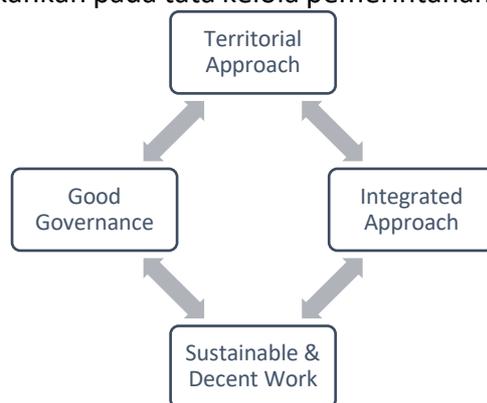
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitan kualitatif dengan menggunakan jenis *case study*. Dua alasan pemilihan jenis ini, pertama kekhususan *setting* penelitian, yaitu Desa Sampirang I (satu) Kabupaten Barito Utara yang merupakan desa sangat tertinggal dan terluar. Kedua yaitu kehendak untuk menggali secara lebih mendalam mengenai potensi lokal dan model pengembangan ekonomi

lokal. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampirang I (satu) Kabupaten Barito Utara, desa ini dipilih sebagai *setting* penelitian karena desa ini merupakan desa terluar dan desa sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu studi literatur, observasi non partisipan, *indepth interview*. Ketiga teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang paling sah, hal ini merupakan manifestasi dari triangulasi data. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan tradisi kualitatif.

Pengembangan ekonomi lokal sebagai suatu landasan

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana aktor-aktor lokal membentuk dan berbagi masa depan di wilayahnya. Dengan arti lain bahwa adanya partisipasi yang mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara stakeholder lokal yang mendesain dan mengimplementasikan bersama strategi yang berdasarkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan tujuan menciptakan pekerjaan yang layak dan kegiatan ekonomi berkelanjutan (G 2001). Sementara itu World bank mendefinisikan sebagai proses yang dilakukan antara publik-bisnis-NGO yang kerja sama untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan Angkatan kerja (World Bank Urban Development Unit. 2003). Dari definisi tersebut dapat dilihat beberapa elemen kunci dari pengembangan ekonomi lokal; Pertama, yaitu Pendekatan lokalitas, dengan tujuan memberdayakan actor lokal untuk membentuk kualitas kehidupan yang lebih baik di wilayah mereka. Kedua, yaitu pendekatan partisipatif, dimana pemangku kepentingan lokal bekerjasama dengan organisasi lain untuk mewujudkan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Dalam hal partisipasi, pengembangan ekonomi lokal menciptakan peluang kerjasama antara lokal privat dan publik sektor dan juga stakeholder lain seperti kelompok sosial maupun politik. Ketiga, pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak serta kesinambungan pembangunan ekonomi (Pose, A. R., & Tijmstra 2006).

Pengembangan ekonomi lokal memiliki 4 (empat) prinsip utama. Pertama *territorial approach* atau pendekatan kewilayahan untuk pembangunan. Kedua, strategi yang terintegrasi. Ketiga, focus pada penciptaan pekerjaan yang berkelanjutan dan layak. Keempat, menekankan pada tata kelola pemerintahan yang baik (A.R and S 2006).



Gambar 1. Prinsip Utama Pengembangan Ekonomi Lokal

Territorial approach bertujuan untuk meningkatkan lokalitas dari ekonomi yang membuat pembangunan dan pengembangan di lokal. Wilayah menjadi focus pembangunan, yang dikombinasikan dengan desentralisasi kekuasaan dan sumberdaya sehingga mampu menciptakan sebuah peluang dan kebutuhan yang berbasis lokal.

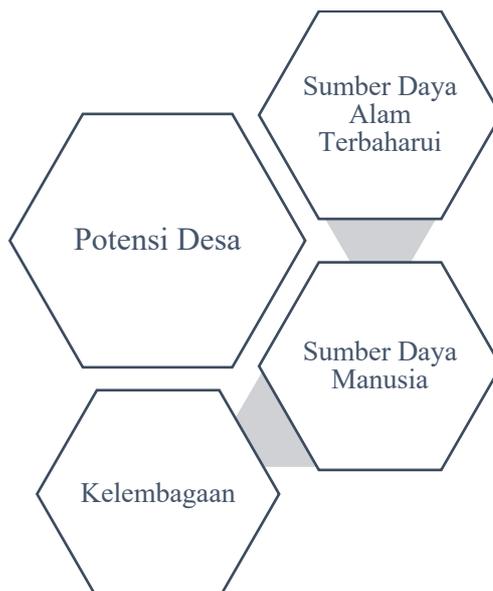
(Martinez-Vazquez, J., & McNab 2001). *Integrated approach* focus membangun pada potensi ekonomi lokal. Pemerintah daerah bersama dengan *stakeholder* lokal dan tenaga ahli yang berasal dari luar untuk melakukan analisis situasi lokal dan menyusun strategi untuk memperbaiki kondisi dasar untuk pembangunan. Untuk menciptakan strategi yang mampu mengatasi masalah dan kondisi yang ada perlu memanfaatkan peluang dengan membangun strategi lokal yang komprehensif melalui 4 (empat) komponen utama yaitu: Perusahaan lokal, *Inward investment*, Sumber daya manusia, Infrastruktur (Rdriguez-Pose 2002).

Sustainable and Decent Work ini menjadi tujuan akhir. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya partisipasi semua *stakeholder* baik public maupun privat. Mengidentifikasi segala peluang sumber daya lokal yang ada untuk menciptakan lapangan kerja, serta membukakan akses dan kesempatan kepada kelompok rentan. *Good Governance*, melibatkan semua actor, baik itu *stakeholder* lokal, penduduk, privat sector dalam pengambilan keputusan dan implementasi, sehingga ini dapat membangun komitmen bersama untuk meningkatkan ekonomi lokal.

Melacak Potensi Desa Sebagai Modal Awal (Asset) Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Sampirang I

Tahapan awal dalam pengembangan ekonomi lokal desa bisa dilakukan melalui pemetaan potensi yang dimiliki oleh Desa Sampirang I sebagai manifestasi dari pendekatan territorial (*territorial approach*). Hal ini dilakukan dengan pemahaman dan cara pandang bahwa apapun yang dimiliki oleh desa, baik itu sumberdaya alam, manusia dengan segala kapasitasnya adalah suatu sumberdaya, asset dan potensi yang bisa dikembangkan. Potensi desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki desa yang dapat dieksplorasi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang paling tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mencurahkan perhatian pada apa yang dimiliki oleh masyarakat dan desa kemudian itulah yang digali sedemikian rupa agar semua dapat menjadi fondasi yang kuat dalam aktivitas-aktivitas pengembangan ekonomi lokal. Oleh Sebab itu, sangat penting bagi desa untuk mengenali apa yang mereka miliki. Dari penelitian yang dilakukan, masyarakat Desa Sampirang I (Satu) sudah sangat menyadari potensi yang mereka miliki, dan sangat menginginkan adanya perubahan kondisi yang mereka alami selama puluhan tahun. Dengan demikian satu step dalam pengembangan masyarakat sudah dilakukan, yaitu penyadaran. Penyadaran adalah hal pertama yang harus dilakukan agar keluar dari status quo.

Desa yang berjarak 104 km dari ibukota Kabupaten Barito Utara, dan berbatasan langsung dengan Desa Mampouk I ini memiliki berbagai potensi seperti Potensi sumberdaya manusia, potensi sumber daya alam terbaru seperti potensi pertanian, potensi hasil hutan, potensi perkebunan dan potensi sumber daya air, serta potensi kelembagaan. Berikut gambaran potensi yang dimiliki oleh Desa Sampirang I (satu).



Gambar 1 Peta Potensi Desa Sampirang I (Satu)

Masyarakat Sampirang I (Satu) sudah menyadari bahwa mereka memiliki potensi desa, seperti pertanian, perkebunan dan hasil hutan, sebagaimana yang disampaikan oleh Madulin yang merupakan tokoh agama hindu kaharingan, ia menyatakan bahwa potensi yang paling besar dari pertanian jagung, dan masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua RT 01 Desa Sampirang I (Satu) bahwa “jagung menjadi komoditas utama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat, hanya saja skala kecil, jika dikembangkan secara lebih luas, akan jadi lebih baik karena akan meningkatkan penghasilan masyarakat” (Masimsak, 2022). Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lidia, masyarakat Sampirang 1 (Satu) yang berprofesi sebagai guru ini juga menyampaikan bahwa mayoritas warga adalah petani yang menanam jagung dan padi. Pernyataan tersebut juga diamini oleh Penjabat Sementara kepala Desa Sampirang I (Satu) bahwa di wilayah kerjanya memang menjadi andalan utama yaitu hasil pertanian jagung, namun masih dikelola secara tradisional dan masih pertanian perseorangan.

Secara eksplisit mendeklarasikan bahwa pertanian tanaman jagung menjadi potensi unggulan, dan secara tidak langsung mereka sudah menyadari potensi ini akan mampu memperbaiki kualitas kehidupan mereka dan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil pertanian jagung selama ini hanya dijual kepada pengepul dalam bentuk pipilan jagung, yang dijual seharga Rp. 3000/kg. tentu hasil ini tidak sebanding dengan biaya produksi dan waktu serta tenaga yang dihabiskan oleh petani. Maka dari itu, sangat penting bagi petani untuk *upgrading value* jagung dengan cara mengolah hasil pertanian jagung, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Selain jagung, masih ada potensi lain dari perkebunan karet dan hasil hutan yang dimiliki oleh Desa Sampirang I (satu) . Sebagaimana yang disampaikan Camat Teweh Timur jika rotan dilempar maka akan tumbuh tanpa ada perawatan khusus. Rotan menjadi hasil Hutan yang ada di Sampirang I (Satu). Rotan akan memiliki nilai jual yang tinggi jika menjadi produk jadi. Banyak yang menjadi pengrajin rotan di Sampirang I (satu), mayoritas

masyarakat hanya menjual rotan ke pengepul dalam bentuk mentah, hanya sebagian kecil yang menjual dalam bentuk barang jadi.

Sementara itu untuk potensi hasil perkebunan yaitu karet. Karet menjadi salah satu komoditas yang dapat diharapkan, karena karet dapat dipanen tanpa perlu memerhatikan musim. Sehingga para petani disampirang satu akan beralih “menyadap” getah jika tidak sedang bertanam jagung atau padi. Kegiatan ini pada akhirnya akan bernilai secara ekonomi. Sebab hasil dari pertanian karet kemudian di jual ke Pengepul oleh masyarakat.

Dengan kata lain bahwa hasil pertanian, perkebunan dan hutan menjadi jalan perekonomian masyarakat setempat, namun selama ini hanya dilakukan secara manual dan skala hasil yang diperoleh masih kecil, padahal masyarakat mempunyai wilayah lahan yang luas yang masih dapat dikembangkan. Disisi lain menjadi permasalahan dalam potensi ini adalah pupuk yang harganya tinggi, bisa dipastikan tanaman atau komoditas unggulan ini akan memberikan kualitas yang baik jika di-suplay dengan pupuk yang baik pula. Kelompok tani sudah mendapatkan bantuan bibit dan pupuk dari pemerintah tidak terlalu banyak. Selama ini petani menghabiskan biaya yang banyak untuk pupuk. Bukan hanya itu, kemampuan teknis dalam pengelolaan lahan yang baik harus mendapatna perhatian khusus oleh pemerintah.

Potensi sumber daya alam terbaru lainnya yang dimiliki oleh Desa Sampirang I (Satu) yaitu sungai dan embung. Kedua hal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan budidaya perikanan, atau yang dikenal sebagai aquaculture. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas biota air pada sungai dan embung yang ada di Desa Sampirang I (Satu), inland aquaculture dengan pemanfaatan keramba sebagai media budidaya menjadi pilihan yang dapat dilakukan untuk peningkatan produktifitas biota air khususnya ikan. Usaha ini dilakukan dengan cara pembenihan sampai dengan pengembangbiakan, agar stok ikan terpenuhi serta dapat memberikan tambahan pemasukan bagi masyarakat yang membudidayakan, dengan melakukan pemasaran sampai ke tangan konsumen. Selain itu budidaya perikan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan protein bagi masyarakat, setidaknya ini akan mengurangi belanja rumah tangga.

Namun Pemerintahan Desa Sampirang I (Satu) sudah memiliki program stimulant perekonomian dari sektor perikanan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program ketahanan pangan yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa sebesar 20%. Dana tersebut di peruntukan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, beberapa diantaranya seperti untuk penyediaan bibit ikan lele. Sejauh ini, dari alokasi anggaran yang tersedia pemerintah desa setempat telah mendistribusikan sebanyak 55 ribu ekor bibit ke masing-masing rumah. Dengan estimasi setiap rumah akan mendapatkan seribu ekor bibit ikan lele. Selain itu, alokasi yang disediakan oleh pemerintah desa setempat berupa pakan untuk perawatan bibit ikan lele yang telah diberikan.

Bantuan berupa dana stimulan ini diharapkan membawa angin segar kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian mereka, karena budidaya perikanan dapat menambah pendapatan yang berdampak pada masyarakat dan juga desa, selain itu memberikan peluang pekerjaan lain bagi masyarakat, selain bertani sebagai mata pencarian utamanya. Dari seluruh potensi sumber daya alam terbaru yang hasilnya

dapat diolah kembali melalui hilirisasi industri. Agroindustri dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengolah potensi tersebut, karena industri ini memiliki kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut (Marsudi 2013).

Sektor industri berbasis pertanian ini akan menyerap tenaga kerja dari Desa Sampirang I (Satu), sehingga mampu memperkokoh kemandirian ekonomi desa dan masyarakat desa nantinya. Agroindustri memiliki beberapa sektor industri, dan yang paling memungkinkan jika berpijak pada potensi yang dimiliki desa, industri pengolahan hasil pertanian (IPHP) menjadi yang paling tepat untuk dikembangkan, dalam hal ini yaitu IPHP tanaman pangan seperti padi dan jagung, IPHP tanaman perkebunan komoditas karet, IPHP tanaman hasil hutan mencakup produk rotan, IPHP perikanan, seperti pengolahan ikan segar. Selain itu juga terkait dengan kesediaan bahan baku. Input pertanian berasal dari produksi masyarakat Desa Sampirang I, sehingga akan mempermudah rantai pasok bahan baku, dikarenakan sumber berada dilokasi yang sama dan secara tidak langsung akan mengurangi biaya produksi untuk mendapatkan bahan baku.

Industri pengolahan hasil pertanian ini dapat memberikan nilai tambah atau memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari input bahan baku dari potensi-potensi yang dimiliki terutama dari potensi sumber daya alam terbarui yang diperoleh dari petani lokal, selain itu dapat dipasarkan atau digunakan bahkan dikonsumsi sendiri oleh masyarakat. Disisi lain dapat meningkatkan daya saing serta memberikan keuntungan secara finansial kepada masyarakat dan desa.

Disparitas Pembangunan Menjadi Penghambat Pengembangan Ekonomi Desa Sampirang I (Satu)

Desa Sampirang I (satu) desa sebagai desa sangat tertinggal atau *very underdeveloped rural area*, label ini merupakan dampak dari adanya ketidakmerataan pembangunan yang relative tinggi di wilayah Barito Utara khususnya, dan Kalimantan Tengah secara umum. Perihal pembangunan menjadi salah satu faktor utama yang akan mengintervensi kondisi sosial ekonomi. Jika terus dibiarkan maka tentu lambat laun akan mengkerangkeng pertumbuhan ekonomi atau bisa disebut karena tidak bertumbuhnya *supply* dan *demand* kebutuhan, mengurangi aktivitas-aktivitas kewirausahaan, dan secara tidak langsung melestarikan kemiskinan dan kondisi yang saat ini terjadi di di tengah masyarakat terutama masyarakat di Desa Sampirang I (Satu).

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sarana telekomunikasi menjadi suatu kebutuhan primer dalam hal pengembangan ekonomi tanpa terkecuali bagi kawasan atau daerah tertinggal, terpencil dan terluar, supaya mengeluarkan mereka dari ketertinggalan, keterbelakangan dan keterisolasian serta mendorong kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat tersebut. Desa Sampirang I memiliki banyak potensi sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam subbab sebelumnya, jika tidak didukung oleh dengan infrastruktur sarana prasarana utama maka harapan akan terwujudnya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya wacana belaka.

Jalan menjadi nadi yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, menghubungkan desa dengan kota dan mendekati yang jauh. Jalan memiliki

fungsi positif dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, peningkatan produktifitas serta mempermudah mobilisasi baik itu barang dan jasa, manusia, serta dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam produktifitas, sehingga laten akan memperbaiki kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan kondisi real yang kemudian dituangkan dalam gambar 13, dapat diketahui dari $\pm 27,2$ Km jalan menuju ke Desa Sampirang I (Satu) dari ibukota kecamatan teweh timur yang terletak di Desa Benangin I, sepanjang $\pm 15,2$ Km adalah jalan tanah dengan kondisinya rusak parah. Hanya $\pm 1,7$ Km saja yang merupakan jalan aspal dengan kondisi yang baik. Potret kondisi jalan menuju ke Desa Sampirang I, untuk menerangkan bahwa disparitas pembangunan itu terjadi dan ini menjadi kebutuhan medesak untuk segera diperbaiki demi terciptanya pengembangan situasi sosial dan ekonomi di Desa Sampirang I (Satu), termasuk desa lainnya yang berada di sekitar wilayah desa yang dipimpin oleh pejabat sementara kepala desa Abdul Mutolib ini.

Disamping infrastruktur jalan dan jembatan, Desa Sampirang I bahkan belum teraliri listrik dan tidak ada jaringan telekomunikasi, dan menjadi salah satu dari 9 desa yang belum teraliri listrik di Kecamatan Teweh Timur. Pada tahun 2021 warga bisa menggunakan listrik dengan memanfaatkan panel surya yang merupakan bantuan dari pemerintah desa yang dianggarkan dari dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran pemerintah untuk mengupayakan perbaikan pembangunan infrastruktur desa. Listrik, jaringan telekomunikasi, jalan dan jembatan sama pentingnya terutama pada situasi yang mengharuskan segala sesuatu serba cepat dan efektif, dalam semua aspek kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Sangat disayangkan jika desa yang memiliki limpahan potensi ini tidak dapat mengaktualisasikannya karena disparitas pembangunan yang memang menjadi fakta dilapangan dan masih menjadi permasalahan yang pelik.

Infrastruktur mempengaruhi kelajuan dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, terlebih lagi barang, jasa, uang, informasi sehingga menciptakan probabilitas harga yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kondisi kekosongan infrastruktur. Contoh input seperti pupuk untuk pengembangan potensi sumberdaya alam terbaru dalam hal ini adalah pertanian jagung dan padi, jika kondisi infrastruktur jalan dalam kondisi yang baik, maka pergerakan pupuk yang masuk ke desa akan lebih mudah dan harga pupuk akan lebih rendah, dan pada sudut lain hasil panen akan dengan mudah dipasarkan. Bahkan adanya pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi iklim investasi.

Listrik dan jaringan telekomunikasi juga mempengaruhi dalam pengembangan ekonomi lokal, karena arus informasi akan lebih cepat sampai ketika menggunakan alat telekomunikasi dan media komunikasi. Ini sangat dibutuhkan untuk diperbaiki, karena semua produktivitas yang dihasilkan oleh Desa Sampirang I (Satu), maka akan dipasarkan untuk mendapatkan pendapatan bagi masyarakat selain untuk dikonsumsi sendiri. Telekomunikasi menjadi tools untuk memasarkan produk yang dihasilkan, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Terlebih lagi kondisi masyarakat yang serba cepat saat ini, menggunakan media untuk mendapatkan banyak informasi, dan juga bisa mendapatkan ide dan gagasan untuk pengembangan hilirisasi produk yang dihasilkan. Bukan hanya itu, menjamurnya marketplace menjadi peluang bagi masyarakat desa untuk memasarkan produk yang akan mereka hasilkan. Jadi dengan

adanya infrastruktur jalan dan telekomunikasi akan memberikan keempatnya bagi masyarakat dalam memasarkan produknya baik menggunakan cara konvensional maupun cara modern dengan memanfaatkan telekomunikasi.

Pada kenyataannya, kondisi ideal pembangunan belum dapat dirasakan oleh desa dan masyarakat desa sampiran I (Satu). Ketimpangan dan kesenjangan pembangunan harus segera diatasi, baik itu jalan, jembatan listrik dan telekomunikasi, karena infrastruktur tersebut turut andil dalam pengembangan perekonomian lokal, dan membukakan akses kepada pasar, sehingga secara equivalent akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat serta lepas dari ketertinggalan sebagaimana kondisi saat ini.

Melihat Intrusi Aktor lain Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Desa Sampiran I (Satu)

Negara mengatur desa salah satunya bertujuan memajukan perekonomian desa dan meminimalkan disparitas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya mencapai cita-cita tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bertugas dalam pembangunan desa yang tujuannya dituliskan secara eksplisit bahwa pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kepala desa dengan beberapa kewenangan yang dimiliki, diantaranya yaitu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengoordinisasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dalam Regulasi tersebut kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa secara langsung menjadi kewajiban yang harus dijalankan dalam masa jabatannya. Perihal pembangunan desa, pemerintah desa Sampiran I (satu) sudah melakukan beberapa hal untuk pengembangan ekonomi lokal, salah satunya dengan upaya reorganisasi BUM Desa sebagai Lembaga yang bertugas untuk meningkatkan pengembangan segala potensi dan kekayaan desa demi memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Sampiran I Nomor : SK.821.29/015/2021 Tentang Pengelola/Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Jemunjung" Desa Sampiran I Periode 2021-2026. Selain menerbitkan surat keputusan, pemerintah desa juga memberikan penyertaan modal usaha BUM Desa.

Dalam pengembangan ekonomi lokal, pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri, maka dari itu perlu adanya campur tangan berbagai pihak terutama, universitas dan industri. Kedua aktor tersebut menjadi penting karena kapasitas masing-masing. Pemerintah desa dapat bekerja sama sebagaimana yang diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Hal tersebut secara nyata memberikan ruang bagi desa agar dapat bergerak cepat untuk meningkatkan

pembangunan desa termasuk pengembangan ekonomi lokal. Hanya saja hal tersebut belum dimaksimalkan oleh pemerintah Desa Sampirang I (Satu). Keleluasaan dalam membuat kerjasama dengan pihak ketiga, seperti universitas dan industri tidak akan membuat pemerintah desa kehilangan control dan posisi sentral dalam pembangunan desa.

Ketiga aktor ini dapat berinteraksi dan berkolaborasi sehingga menciptakan inovasi yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan dalam pengembangan ekonomi. Universitas memiliki knowledge dari riset dan teknologi tepat guna yang dapat ditransferkan kepada desa, dan Industri memiliki teknologi, inkubasi bisnis serta pengalaman yang juga dapat dishare kepada desa. Tidak terjalinnya interaksi antara aktor ini dikarenakan konektifitas dan aksestabilitas ke desa yang terbilang sulit dijangkau. Namun potensi desa yang besar akan terasa sia-sia jika tidak dikelola dengan baik. Maka sangat dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar aktor untuk mengaktualisasi segala potensi yang ada di Desa Sampirang I.

Model Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Sampirang I (Satu)

Pada sub bab sebelumnya sudah dijabarkan segala potensi yang dimiliki desa baik potensi alam, potensi sumberdaya manusia maupun potensi kelembagaan yang menjadi peluang untuk menciptakan ekonomi baru. Selain itu, telah diperlihatkan adanya disparitas pembangunan infrastruktur yang menyebabkan Desa Sampirang I menjadi golongan desa sangat tertinggal yang dampaknya secara langsung berimbas pada kondisi perekonomian masyarakat desa. Maka dari itu, terdapat beberapa hal fundamental yang mendesak untuk segera dilakukan oleh pemerintah desa dengan kewenangan yang dimiliki, sebelum melakukan upaya pengembangan ekonomi lokal di desa yang mayoritas dihuni oleh suku Dayak ini agar pada masa depan tercipta perbaikan kualitas kehidupan bagi masyarakatnya sebagaimana yang diharapkan melalui pengembangan ekonomi lokal. Terdapat dua tahapan dalam model pengembangan ekonomi lokal Desa Sampirang I (Satu) yaitu tahapan inisiasi dan tahapan eksekusi.

Dalam penelitian ini, tahapan inisiasi dimaknai sebagai tahapan pertama yang menjadi momentum dimana pemerintah desa menjalankan fungsinya dan segenap upaya sebagai institusi otonom yang mampu merombak kondisi perekonomian yang ada saat ini berlangsung menuju perekonomian desa yang lebih baik. Sementara itu, tahapan aksi atas apa yang telah diupayakan oleh pemerintah desa, dan pelimpahan wewenang kepada Lembaga penggerak ekonomi desa dalam hal ini adalah BUM Desa untuk menjalankan aksi dan memainkan peran dominan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

A. Tahapan Inisiasi

Tahapan inisiasi menjadi sangat krusial, karena pada tahapan ini adalah awal dimana pemerintah desa harus mencurahkan segala upaya, mulai dari pembuatan kebijakan, penyediaan sarana dan percepatan pembangunan, membangun kerjasama, dan penguatan organisasi penggerak perekonomian desa demi menciptakan iklim perekonomian yang dinamis di Desa.

Policy Making Demi Pengembangan Ekonomi Desa

Pengakuan dan penghormatan atas desa, serta kejelasan status dan kepastian hukum yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta sistesis antara local self government dengan self-governing community, asas subsidiaritas dan asas-asas lainnya dalam pengaturan desa, maka memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan decision making secara lokal demi kepentingan masyarakat desa tentang apa-apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh sebab itu, pemerintah desa menjadi agen kunci karena memiliki kuasa untuk melahirkan output politik dengan memformulasi dan mengimplementasikan seperangkat regulasi dan kebijakan untuk kepentingan lokal yang diarahkan untuk membuka ruang gerak pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta sepaket program ekonomi berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki desa, kemudian dapat dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagai agenda tahunan. Pemerintah desa harus jelas menentukan visi dan tujuan sehingga dengan adanya kebijakan yang jelas akan mempengaruhi kondusifitas pengembangan ekonomi lokal. Dalam pembuatan kebijakan juga perlu melibatkan lokal stakeholder agar berpartisipasi dalam pengembangan desa, dan membantu membangun kepercayaan serta dapat menciptakan dan menumbuhkan kohesi sosial, sehingga akan mengurangi resiko konflik. Hal tersebut penting dilakukan karena dalam pengembangan ekonomi lokal perlu menggunakan pendekatan partisipatif dimana aktor lokal harus didorong dan dilibatkan untuk menentukan rencana strategi, dan implementasi rencana tersebut.

Penyediaan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah desa juga harus mengupayakan dan menyediakan sarana prasarana, termasuk juga infrastruktur lainnya yang mendukung dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Jalan menjadi isu utama yang harus dibenahi, karena merupakan jalur distribusi baik barang maupun manusia sehingga akan meningkatkan efisiensi ekonomi serta menjadi daya tarik untuk penciptaan bisnis baru. Pemerintah desa dapat bersinergi dengan desa-desa lainnya serta melakukan bekerja sama dengan pemerintah level di atasnya baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya mengatasi masalah disparitas pembangunan yang selama ini terjadi. Selain itu dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa juga dapat mendapatkan manfaat dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan yang mengambil keuntungan di sekitar desa.

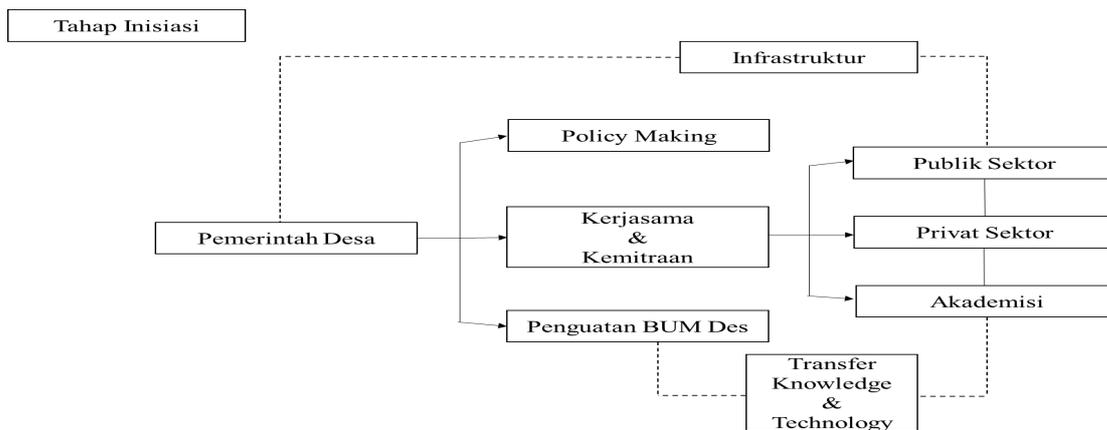
Bukan hanya jalan, namun infrastruktur lain seperti listrik dan telekomunikasi menjadi penting untuk disediakan demi mendukung proses pembangunan ekonomi di Desa Sampirang I (Satu), perlu adanya sinergi positif dan jelas untuk memaksimalkan hasil pengembangan ekonomi lokal karena segala informasi dan networking dapat dibangun melalui telekomunikasi. Sarana lain dapat disediakan oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi dapat berupa perbaikan showroom untuk menempatkan dan memasarkan produk lokal, termasuk pabrik atau warehouse yang menjadi tempat produksi dan penyimpanan demi memangkas biaya yang akan dikeluarkan.

Membangun Kerjasama dengan Multi-Sektor

Pemerintah desa memiliki peran esensial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan dapat mendukung proses pengembangan ekonomi lokal, namun dalam

membangun dan mengembangkan ekonomi lokal yang kuat, harus melibatkan berbagai aktor seperti sektor privat dan akademisi. Kerjasama dapat berupa kolaborasi dan kemitraan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan masing-masing aktor.

Dengan kerjasama memungkinkan bagi desa untuk mendapatkan banyak keuntungan terutama dalam membangun networking dan berdampak pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan yang memungkinkan adanya konvergensi program antara aktor sehingga akan menciptakan hasil yang efektif. Kemitraan harus dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang selama ini mengganjal perkembangan ekonomi di desa. Berikut ilustrasi bagan dari tahap inisiasi.



Tahap Inisiasi Model Pengembangan Ekonomi Lokal
Sumber : Analisis Peneliti, 2022

Dalam konteks ini, BUM Des menjadi organisasi yang dapat mengembangkan ekonomi lokal. maka memperkuat kelembagaan ekonomi lokal dengan *capacity building* untuk mengoptimalkan peran BUM Desa termasuk manajerial dan unit bisnis dan produk unggulan desa menjadi suatu keharusan. Capacity building dipahami sebagai upaya penguatan dan pengembangan kapasitas yang sudah ada baik sumber daya manusia maupun organisasinya. BUM Desa merupakan Lembaga penggerak ekonomi yang harus didorong untuk mencapai goal yang diharapkan, yaitu kemandirian desa, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Penguatan kapasitas dalam pengelolaan atau manajerial BUM Desa dapat dilakukan dalam beberapa bidang. Diantaranya, manajemen dan laporan keuangan. Penguatan kapasistas dalam manajemen keuangan akan mempermudah BUM Desa dalam pembuatan keputusan-keputusan seperti keputusan pendanaan, keputusan deviden dan keputusan investasi, berdasarkan informasi dari laporan keuangan. Dari situlah kemudian BUM Desa dapat memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko serta menjaga stabilitas keuangan. Kemudian, manajemen sumber daya manusia. Penguatan pada bidang ini bisa dilakukan dengan melakukan Analisa pekerja, mengukur produktifitas kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, kompensasi, perekrutan dan pemberhentian karyawan. Terakhir, model bisnis dan strategi unit usaha, dan pengembangan usaha. Pada bidang ini dapat dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki desa, dan melakukan inovasi untuk menambah nilai dari produk yang dihasilkan,

serta dalam pengembangan usaha, pemasaran dan penjualan bisa dilakukan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, termasuk melakukan kerja sama.

Selain itu, dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan agar segala aktifitas yang dilakukan BUM Desa dapat terinformasikan dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Di lain sisi, dengan adanya penerapan *good corporate governance* secara langsung akan memperbaiki performa BUM Desa serta keberlanjutan organisasi penggerak ekonomi yang usahanya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

B. Tahap Aksi

Pada tahapan ini, BUM Desa sebagai badan usaha memainkan peranan penting dan bertindak menjadi penanggungjawaban pengembangan ekonomi lokal di Desa Sampirang I (Satu). Tahapan kedua ini, merupakan fase lanjutan yang dapat dilakukan dimana BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan mendapatkan keuntungan, namun lembaga yang didirikan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan ini juga harus memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada analisis kelayakan potensi di Desa Sampirang I (Satu), maka BUM Desa dapat bergerak dalam sektor riil dengan membentuk unit-unit usaha. Unit usaha merupakan bagian vital dalam penyelenggaraan bisnis BUM Desa, dan diciptakan berdasarkan potensi yang dimiliki serta kondisi perekonomian desa. Pada tahapan ini, BUM Desa dapat mengambil posisi dengan menggantikan peran pengepul, Selama ini di Desa Sampirang I (Satu) rantai pasar dilakukan secara sederhana, seperti hasil panen petani dijual kepada pengepul dan konsumen lokal secara langsung, sehingga tidak ada tambahan nilai ekonomi. Maka dari itu perlu merencanakan rantai pasar baru, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut.

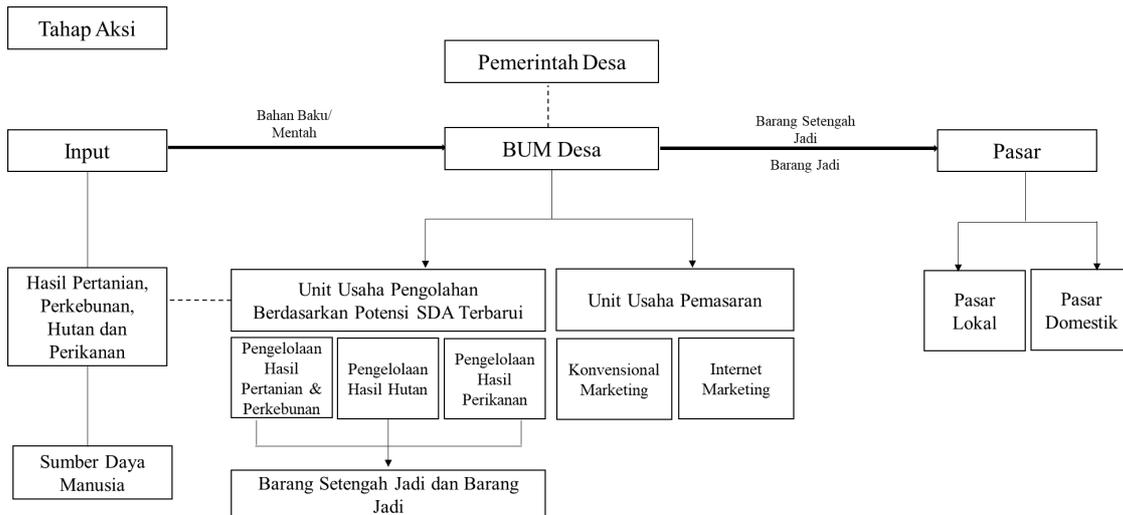
Rekayasa Rantai Pasar Baru Desa Sampirang I (Satu)



Sumber : Analisis Peneliti, 2022

Dalam pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUM Desa, perlu melakukan perencanaan dan perhitungan berdasarkan analisis-analisis terhadap potensi yang dimiliki desa sebagai sumber daya utama. Dari hal tersebut maka unit usaha BUM Desa Jemunjung yang dapat diciptakan adalah unit usaha pengolahan hasil sumber daya alam terbaru baik dari hasil pertanian, perkebunan, hutan dan perikanan dan unit pemasaran.

Tahap Aksi Model Pengembangan Ekonomi Lokal



Sumber : Analisis Peneliti, 2022

Skemanya berlangsung, pertama unit usaha pengolahan akan mengolah bahan baku yang merupakan sumber utama dan didapat dari petani lokal menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, sehingga akan mendapat peningkatan nilai ekonomi. Kegiatan dalam unit ini adalah pengolahan jagung, rotan dan ikan menjadi barang dengan nilai jual yang lebih tinggi. Misalnya Produk olahan jagung dapat dijadikan tepung dan makanan ringan. Kulit jagung, tongkol, dan rambut jagung dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Pengolahan rotan dapat dijadikan kerajinan anyaman berupa tas, topi, kursi dan lain sebagainya. Olahan karet dapat dijadikan hasil kerajinan tangan berupa souvenir. Bahkan hasil perikanan dapat diolah menjadi makanan jadi seperti abon. Dapat dikatakan bahwa pada unit usaha pengolahan ini sebagai industri hilir yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi.

Selanjutnya, unit pemasaran. Pada unit ini, ada aktifitas yang dilakukan sebelum pemasaran yaitu pemilahan produk dengan melakukan quality control. Aktivitas packaging dan branding produk yang dihasilkan agar memiliki mutu dan kualitas baik dan ini akan meningkatkan nilai jual menjadi lebih tinggi. Aktivitas utama dalam unit pemasaran adalah melakukan strategi penetrasi pasar dengan metode rapid skimming dan rapid penetration dengan menjual produk yang sudah ada ke pasar melalui promosi, dan publikasi yang dapat dilakukan baik secara konvensional maupun digital menggunakan bantuan e-commerce dan atau media sosial. Aktivitas penetrasi pasar bertujuan untuk mendapatkan konsumen dan merebut konsumen pemakai produk kompetitor dengan cara promosi dan penentuan harga produk yang dihasilkan BUM Desa. Unit inilah yang memastikan bagaimana cara agar produk yang telah dihasilkan terdistribusikan sampai ke tangan pelanggan.

Terakhir, BUM Desa yang berkerja untuk mendapatkan pertambahan nilai ekonomi yang secara langsung akan memberikan pendapatan asli desa yang merupakan hasil usaha desa. Bukan hanya secara ekonomi, namun juga nilai sosial akan bertambah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa sumberdaya utama adalah potensi desa, termasuk manusia yang ada di dalamnya, terbukanya kesempatan kerja karena unit-unit usaha BUM Desa akan terasa manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, sesuai dengan kehendak awal pengembangan ekonomi lokal. Hasil pertanian,

perkebunan, hutan dan menjadi sumber daya utama keberlangsungan unit usaha, dan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk kerjasama antara BUM Desa dengan masyarakat lokal, dan tentu akan selaras dengan pencapaian tujuan dari pengembangan ekonomi lokal di Desa Sampirang I (Satu). Berikut gambaran tahap aksi dalam model pengembangan ekonomi lokal di Desa Sampirang I (Satu).

Penutup

Terciptanya kemandirian desa merupakan cita-cita yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini didukung dengan suntikan dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, hal ini dapat dibaca sebagai upaya menciptakan kondisi tersebut. Namun belum semua desa mampu mencapai level kemandirian itu, Desa Sampirang I (Satu) salah satunya, bahkan masuk ke dalam kelompok desa sangat tertinggal. Upaya yang dilakukan untuk lepas dari kelompok tersebut salah satunya adalah dengan pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya lokal agar terciptanya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, potensi sumberdaya alam terbaharui, sumber daya manusia dan BUM Desa sebagai bentuk potensi kelembagaan menjadi modal awal untuk melakukan pengembangan ekonomi desa, hal tersebut dilihat dengan pendekatan kewilayahan, namun mobilisasi modal untuk mengaktualisasikannya terganjal oleh dispartitas pembangunan, serta tidak adanya intrusi multi-sektor yang menyentuh Desa Sampirang I (Satu), yang membuat kondisi ekonomi yang stagnan. Maka dari itu, dalam model pengembangan ekonomi lokal khususnya Desa Sampirang I (Satu) yang notabene desa sangat tertinggal dapat dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahapan inisiasi dan tahapan aksi dengan dua aktor utama yaitu pemerintah desa dan BUM Desa sebagai entitas yang berwenang dan bertugas untuk peningkatan kapasitas perekonomian desa.

Pemerintah desa menjalankan peranan penting dalam tahapan inisiasi, memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan menjadi kunci, karena pemerintah desa, harus membuat kebijakan dan paket program pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan multi sektor, melakukan lobby dan negosiasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi untuk percepatan pembangunan serta memperkuat lembaga penggerak ekonomi desa. Sementara itu, pada tahapan aksi yang menjadi aktor utama adalah BUM Desa yang memainkan peran sentral menjadi lembaga yang mengaktualiasasikan dan mengupgrade value dari hasil pertanian, perkebunan, hutan, dan perikanan dari produsen lokal, serta memasarkan produk yang dihasilkan, dari hasil kerjasama baik transfer knowledge dan technology dari berbagai aktor dalam aktivitas tersebut, maka terciptalah kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal tersebut tentu akan berdampak nyata bagi desa dan masyarakatnya. Bagi desa dengan adanya pengembangan ekonomi lokal akan menciptakan sumber pendapatan asli desa dari hasil usaha desa. Bagi masyarakat desa tentu akan berimbas pada pendapatan dan kesejahteraan.

Model pengembangan ekonomi lokal dapat dicapai jika adanya upaya optimal dari Pemerintah Desa dan BUM Desa bersama-sama dengan aktor lain baik public sektor, privat sektor, dan akademisi dalam jalinan kerjasama dan kemitraan serta kolaborasi untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Sampirang I, Camat Teweh Timur. Tim Enumerator yang telah membantu dalam kelancaran penelitian.

Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Pendanaan Riset Inovatif Produkris (RISPRO) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sesuai perjanjian kontrak nomor: 020/E.4.1/AK/04.RA/2021 tentang Pendanaan Program Riset Keilmuan.

Daftar Pustaka

- A.R, Pose, and Tijmstra S. 2006. *Sensitizing Package on Local Economic Development*. New York: ILO.
- Ahmad Soleh. 2017. "Desa, Strategi Pengembangan Potensi." *Jurnal Sungkai* V(1): 32–52.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. 2021a. "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Semesteran (Ribuan Jiwa), 2019-2021." Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
- . 2021b. "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Daerah Tempat Tinggal Semesteran (Persen)." Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. (2021). *Kecamatan Teweh Dalam Angka 2021*. Barito Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
- Creswell, John W. 2015. *62 Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. 5th ed. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Desa Sampirang I. (2021). *Profil Desa Sampirang I 2021*. Profil Desa Sampirang I 2021. Desa Sampirang I, Kalimantan Tengah, Muara Teweh: Desa Sampirang I.
- G, Canzanelli. 2001. *Overview and Learned Lesson on Local Economic Development, Human Development, and Decen Work*. Geneva: ILO.
- H, Rudiansyah. 2019. "Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sindangsari." *Moderat : Jurnal ilmu pemerintahan*.
- Husna, N. 2013. "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(1): 72874.
- Marsudi, Hidup. 2013. "Kajian Agroindustri Berbasis Masyarakat Kabupaten Karanganyar." 4: 21–44.
- Martati, Indah, . Suminto, and Andi Syarifuddin. 2013. "Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 15(2): 123–30.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. 2001. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. Atlanta: Georgia State University.
- Nafsi. 2020. "Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Pedesaan." *J EL-RIYASAH* 11(1): 54–66.

- Nel, Etienen. 2001. "Local Economic Development: A Review and Assesment of Its Current Status in South Africa." *Urban Studies* 38(7): 1003–24.
- Pose, A. R., & Tijmstra, S. 2006. *Sensitizing Package on Local Economic Development*. New York: ILO.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif :jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Raya, Tim Universitas Palangka. 2019. *Studi Kelayakan Pendirian Sentra Industri Jagung Di Kabupaten Barito Utara*. Palangka Raya.
- Rdriguez-Pose, A. 2002. *The Role of The ILO in Implementing Local Economic Development Strategies in a Globalised World*. Geneva: ILO.
- Satria, Dias. 2009. "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang." *Journal of Indonesian Applied Economics* 3(1): 1–2009.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank Urban Development Unit. 2003. *Local Economic Development :LED Quick Reference*. Washington, DC.

Daftar Narasumber

- Winardi, Camat Teweh Timur Barito Utara Kabupaten Barito Utara, 8 Februari 2022, pukul 10.15 WIB.
- Mutolib, Pejabat Sementara Kepala Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, 8 Februari 2022, pukul 15.05 WIB.

Tentang Penulis

Anyualatha Haridison adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.

Dian Iskandar adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.

Ummu Habibah Gaffar adalah dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.